



Strategi Pembelajaran IPS : Mengatasi Masalah Kontemporer pada Anak Usia SMA

Nadya Anisa Iffa¹, Muhammad Rizky Kurniawan², Razin Faldam³, Sani Sapitri⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email: nadyaanisaiffa@gmail.com¹, rizkykurniawan2215@gmail.com², razinhiedler@gmail.com³, sani_safitri@fkip.unsri.ac.id⁴,

Article Info

Article history:

Received June 02, 2025

Revised June 15, 2025

Accepted July 05, 2025

Keywords:

Strategy, Social Issues, Social Studies, Youth.

ABSTRACT

This study aims to explore Social Studies learning strategies that are effective in addressing contemporary social issues faced by high school students. With the increasing complexity of social issues such as injustice, climate change, and social conflict, it is important for social studies education to not only convey facts, but also equip students with critical and analytical skills. The research method used is descriptive qualitative, with data collection through various articles and also using journal reviews as data sources. The results showed that the application of learning methods based on contemporary social issues can increase student motivation and involvement in the learning process, this research is expected to be knowledge for high school students to understand contemporary issues that must be understood and can find out how to overcome contemporary problems around them.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received June 02, 2025

Revised June 15, 2025

Accepted July 05, 2025

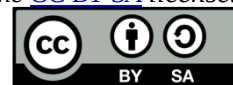
Keywords:

IPS, Masalah Sosial, Remaja, Strategi.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial yang efektif dalam mengatasi masalah sosial kontemporer yang dihadapi oleh siswa SMA. Dengan meningkatnya kompleksitas isu sosial seperti ketidakadilan, perubahan iklim, dan konflik sosial, penting bagi pendidikan IPS untuk tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan kritis dan analitis. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui berbagai artikel dan juga menggunakan review jurnal yang menjadi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran berbasis isu sosial kontemporer dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar, penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan untuk anak-anak sma dapat memahami isu kontemporer yang harus dipahami dan dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi permasalahan komtemporer di sekitar mereka.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nadya Anisa Iffa

Universitas Sriwijaya

E-mail: nadyaanisaiffa@gmail.com



Pendahuluan

Sebagai bagian dari masyarakat, pastinya akan menyadari bahwa banyaknya masalah-masalah yang hadir di sekitar kita. Masalah-masalah seperti kemiskinan, pengangguran, pungutan liar, rasisme, diskriminasi, korupsi dan berbagai masalah yang mengganggu kestabilan lingkungan masyarakat lainnya. Masalah sosial merupakan sebuah keadaan, situasi, perilaku, dan kondisi yang tidak diinginkan yang ada di masyarakat, organisasi sosial, hubungan sosial, dan struktur sosial (Tutesa & Wisman, 2020). Tentunya masalah-masalah ini harus segera diatasi sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera. Artikel ini akan berfokus kedalam masalah-masalah kontemporer yang dapat diartikan sebagai masalah yang masih ada dan relevan saat ini.

Salah satu upaya penanggulangan masalah-masalah sosial yang telah mengakar di masyarakat adalah dengan mendidik masyarakat pada saat masa sekolah. Salah satu mata pelajaran yang dapat digunakan dalam pendidikan kemasyarakatan peserta didik tentunya adalah pembelajaran IPS. Pendidikan IPS bermula di Inggris pada tahun 1827, kemudian beranjak ke Amerika Serikat dan masuk dalam kurikulum sekolah mereka, dan akhirnya pada pertengahan abad ke-20 pendidikan IPS masuk ke Indonesia (Hidayat, 2020). Pembelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, berpotensi untuk menjembatani perbedaan individu antar siswa dan juga menciptakan siswa yang cinta tanah air dengan sikap dan moral yang baik (Rismayani et al., 2020). Pembelajaran IPS tentunya tidak bisa diajarkan begitu saja, dibutuhkan strategi yang juga menyesuaikan dengan peserta didik sehingga aktivitas pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

Artikel ini akan memberikan penjelasan dan juga menawarkan solusi akan masalah-masalah sosial kontemporer dengan memberikan strategi pembelajaran IPS sehingga peserta didik mendapat aktivitas pembelajaran yang efektif. Tujuan dari pembelajaran tersebut tentunya adalah sebagai usaha untuk menghilangkan masalah-masalah sosial kontemporer yang marak di masyarakat dengan mendidik para remaja. Artikel ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada tenaga pengajar dalam proses pembelajaran IPS.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang mengumpulkan materi dari buku, artikel, dokumen dan sebagainya (Sari, 2020). Kami mengumpulkan dan menyaring berbagai artikel dari berbagai jurnal yang kemudian kami analisis sehingga menjadi argumen dalam artikel kami. Argumen dalam artikel kami akan berdasarkan informasi-informasi yang kami dapat dari artikel-artikel tersebut.

Penelitian yang kami gunakan merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata deskriptif penelitian berdasarkan hal yang diamati (Charisma et al., 2022). Kami akan menghasilkan penjelasan dalam artikel kami berdasarkan pengamatan dan analisis dari lingkungan sekitar dan juga berbagai artikel.

Hasil dan Pembahasan

Isu kontemporer dalam permasalahan sosial membuat dampak pada masyarakat peninjauan secara sistematis dalam menghadapi isu kontemporer terhadap permasalahan sosial yang dilakukan agar masyarakat dapat bijak dalam menghadapi dan menyikapi permasalahan sosial (Deng & Multidisipliner, 2024). Isu kontemporer merujuk pada masalah-masalah yang muncul dan menjadi perhatian utama dalam masyarakat saat ini, sering kali terkait dengan perkembangan sosial, politik, dan teknologi (Destrianjasari et al., 2022). Dalam konteks ini, isu-



isu kontemporer dapat diartikan sebagai pokok persoalan yang tidak hanya relevan dengan kondisi saat ini, tetapi juga mempengaruhi pola pikir dan perilaku individu serta masyarakat secara keseluruhan. Isu ini mencakup berbagai topik yang sedang hangat diperbincangkan, seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan dampak teknologi terhadap kehidupan sehari-hari yang membuat banyak permasalahan dalam kehidupan masyarakat dengan hal-hal (Henni Endayani, 2023).

Isu kontemporer yang mengarah pada permasalahan sosial memiliki dampak yang lebih besar pada masyarakat. Permasalahan sosial dapat didefinisikan sebagai kondisi kontradiksi antara harapan masyarakat dan kenyataan yang ada. Ini dapat mempengaruhi interaksi sosial dan nilai-nilai yang diidentifikasi oleh kelompok. Menurut Soerjono Soekanto, masalah sosial adalah ketidakseimbangan antara elemen budaya dan masyarakat yang dapat membahayakan nyawa kelompok sosial (Tangdilintin & Prasetyo, 2014). Permasalahan sosial kontemporer dalam masyarakat seperti kasus korupsi, kemiskinan pada masyarakat, dan juga deskriminasi golongan masyarakat.

Korupsi merupakan isu kontemporer yang menjadi permasalahan yang terus berlanjut dari masa kemasa yang mengakibatkan dampak buruk pada masyarakat. Korupsi kolusi dan nepotisme terus berjalan hingga di masa sekarang terbukti dengan banyaknya permasalahan sosial akibat dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme (Ama & Kadir, 2024). Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah kecurangan pengambilan hak milik orang lain, perbuatan ilegal, penipuan dan menetapkan maupun menunjuk seseorang menggantikan seseorang tidak pada prosedur aturan (Governance et al., 2022).

Permasalahan sosial yang menjadi pemicu kerugian pada negara, tindakan korupsi membuat pembangunan negara menjadi terhambat dan seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan juga permasalahan lainnya yang timbul akibat tindakan korupsi. Korupsi sering kali dianggap hal yang kejam namun tidak dengan hukuman yang diberikan oleh para pemerintah tidak memikirkan dampak kedepan seperti apa. Terdapat dua faktor yang menonjol pada praktek korupsi yaitu faktor manusia dan juga faktor sistem. Faktor manusia menunjukkan bahwa setiap pegawai harus memiliki moralitas dan nasionalisme dalam bekerja sehingga tidak menjadi seseorang yang melakukan praktek korupsi dan juga faktor sistem aturan tidak sejalan dengan apa yang dikerjakan dan melakukan penyimpangan-penyimpangan yang merugikan negara atau perusahaan (Kkn et al., 2021). Tindakan korupsi yang bisa kita ambil adalah kasus pengelapan dana pada PT Timah Indonesia, seseorang yang telah melakukan tindakan korupsi jelas membuat negara menjadi sangat dirugikan, namun hukuman yang ditetapkan tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan atau mempermudah seseorang yang telah terbukti melakukan tindakan korupsi.

Tindakan korupsi menjadi penghambat terbesar dari kemajuan negara salah satunya permasalahan sosial kemiskinan yang terjadi pada Indonesia akibat dari terhambatnya pembangunan lapangan kerja akibat korupsi yang dilakukan oleh pihak tertentu. Kemiskinan adalah permasalahan sosial yang sulit untuk dihilangkan dari Indonesia, berbagai aspek yang membuat masyarakat mengalami kemiskinan, kemiskinan ditandai dengan rendahnya kualitas kehidupan masyarakat Indonesia (Masyarakat, Fakultas Perlindungan, 2023). Kemiskinan terjadi akibat rendahnya pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat, turunya kualitas pada sumber daya alam dan sumber daya manusia, rendahnya tingkat kesehatan maupun pendidikan. Permasalahan sosial tersebut sampai sekarang menjadi fokus utama pemerintah dampak yang dihasilkan dari kemiskinan ialah banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, serta angka pengangguran menjadi lebih tinggi dari masa kemasa, dan kasus-kasus kejahatan akibat dari kemiskinan (Penduduk et al., 2023). Kemiskinan yang menjadi permasalahan utama dalam kehidupan sosial menjadi tantangan besar dalam masyarakat namun kebijakan pemerintah sering bertentangan terhadap masyarakat seperti peraturan dalam syarat kerja yang harus dipenuhi oleh masyarakat, lapangan kerja yang sempit namun masyarakat bertambah banyak menjadi fokus utama dalam kasus kemiskinan.



Permasalahan sosial kemiskinan bukan hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat saja namun juga berdampak pada status sosial pada masyarakat, akibat terjadi kemiskinan dan kesenjangan perekonomian sering kali munculnya deskriminasi pada golongan tertentu (Pengemis et al., 2024). Diskriminasi adalah perilaku, sikap, atau politik yang memperlakukan seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik spesifik seperti breed, etnisitas, agama, jenis kelamin, status sosial, atau ekonomi. Diskriminasi sering melibatkan pengecualian atau batasan individu atau kelompok yang terlihat berbeda oleh mayoritas orang (Saludung et al., 2019)

Tindakan deskriminasi terjadi akibat dari terciptanya kesenjangan status sosial masyarakat atau perbedaan unsur kebudayaan dari berbagai macam golongan pada masyarakat, perbedaan ini memnimbulkan banyak masalah yang terjaid seperti rasisme pada suatu kaum dan tindakan kriminal yang mengarah pada kerugian (Wicaksono & Soponyono, 2022) Deskriminasi memiliki macam-macam bentuk seperti dekriminasi pada ras atau etnik, deskriminasi agama, deskriminasi gender yang menjadi terciptanya deskriminasi dalam masyarakat. Deskriminasi adalah tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan hak asasi manusia dan bertentangan dengan dasar negara Indonesia, namun kasus deskriminasi masih menjadi permasalahan sosial yang masih belum terselesaikan dan menjadi permasalahan dalam persatuan dan kesatuan negara.

Pancasila sebagai ideologi negara dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara menghadapi tantangan serius akibat perubahan sosial dan budaya. Salah satu isu nyata dari merosotnya nilai-nilai Pancasila adalah semakin "berkurangnya semangat gotong royong dan rasa kebersamaan dalam masyarakat". Individualisme yang semakin berkembang, terutama di daerah perkotaan, menyebabkan nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial mulai terpinggirkan.

Selain itu, meningkatnya intoleransi dan sikap eksklusif dalam kehidupan bermasyarakat juga menunjukkan pergeseran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Sejumlah kelompok masyarakat mulai menunjukkan kecenderungan untuk menolak keberagaman dan lebih mengedepankan identitas kelompok mereka sendiri. Hal ini berpotensi melemahkan sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) serta sila ketiga (Persatuan Indonesia). Tidak hanya itu, munculnya organisasi atau kelompok yang secara terangterangan menolak Pancasila sebagai ideologi negara menjadi ancaman bagi persatuan bangsa. Beberapa kelompok tertentu bahkan mencoba menggantikan Pancasila dengan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang telah disepakati dalam konstitusi.

Globalisasi juga menjadi faktor yang mempercepat pergeseran nilai dalam masyarakat. Budaya asing yang masuk tanpa filter dapat menggerus nilai-nilai Pancasila jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang kuat terhadap ideologi bangsa. Masyarakat, terutama generasi muda, lebih mudah terpengaruh oleh budaya konsumtif dan gaya hidup instan yang dapat melemahkan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.

Diperlukan upaya yang lebih serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, untuk kembali menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila harus lebih relevan dengan perkembangan zaman agar dapat diterapkan secara nyata oleh generasi muda. Selain itu, penguatan wawasan kebangsaan serta peningkatan kesadaran terhadap pentingnya toleransi dan persatuan menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan ini. Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan sistemik yang telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat. Berdasarkan analisis dari dokumen yang diunggah, korupsi dapat diatasi melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mengatasi korupsi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membangun kesadaran kolektif di masyarakat bahwa korupsi merupakan tindakan yang merusak moralitas, keadilan, dan kesejahteraan umum. Kesadaran ini harus ditanamkan sejak dini dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat kerja. Pendidikan karakter yang menanamkan nilai-



nilai Pancasila, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial, harus menjadi bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah. Selain itu, tokoh agama dan masyarakat harus aktif dalam memberikan teladan dan membimbing masyarakat agar menolak segala bentuk korupsi. Di lingkungan pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi langkah penting dalam mencegah korupsi. Sistem administrasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi harus diterapkan untuk meminimalisir celah bagi tindakan korupsi. Pemberian gaji yang layak bagi pegawai negeri juga dapat membantu mengurangi godaan untuk melakukan korupsi. Selain itu, pengawasan yang ketat oleh lembaga antikorupsi harus diperkuat, baik dalam bentuk pencegahan maupun penindakan. Hukuman bagi para pelaku korupsi harus diperberat agar memberikan efek jera, termasuk penyitaan aset hasil korupsi untuk dikembalikan kepada negara.

Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi juga sangat penting. Media massa dan organisasi masyarakat sipil harus terus berperan dalam mengawasi kebijakan publik serta melaporkan tindakan korupsi yang terjadi. Budaya melaporkan tindakan korupsi harus didorong dengan memberikan perlindungan bagi pelapor (whistleblower). Selain itu, apresiasi bagi individu atau institusi yang berhasil menerapkan prinsip antikorupsi juga perlu diberikan untuk meningkatkan semangat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Dalam ranah politik, regulasi yang ketat terhadap pendanaan partai politik dan kampanye harus diterapkan untuk menghindari praktik korupsi politik. Proses pemilihan pemimpin harus dilakukan secara transparan, dan masyarakat harus didorong untuk memilih pemimpin yang berintegritas serta memiliki rekam jejak yang bersih dari korupsi. Di sektor ekonomi, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan memastikan bahwa regulasi bisnis tidak menciptakan celah bagi suap dan gratifikasi. Kemudahan dalam perizinan usaha serta penghapusan birokrasi yang berbelitbelit dapat mengurangi praktik suap. Selain itu, sektor pajak dan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus diawasi dengan ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran.

Institusi pendidikan juga harus mengambil peran lebih aktif dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Selain mengajarkan teori tentang bahaya korupsi, sekolah dan universitas harus mengajarkan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengelolaan keuangan yang transparan, kejujuran dalam akademik, serta menanamkan budaya kerja keras tanpa kecurangan. Keseluruhan upaya ini harus didukung oleh keberanian dan ketegasan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang lemah hanya akan memperburuk situasi, karena koruptor akan merasa aman dari hukuman. Oleh karena itu, independensi lembaga penegak hukum harus dijaga, dan segala bentuk intervensi politik harus dihilangkan dalam proses hukum. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam berbagai aspek kehidupan, korupsi dapat diberantas secara efektif, sehingga kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. (Saputra, 2017)

Pendekatan proses dalam upaya penanggulangan kemiskinan menekankan pada pelibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan program. Konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa banyak program pengentasan kemiskinan yang kurang efektif karena tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat miskin. Oleh karena itu, dengan melibatkan mereka secara langsung, program yang dirancang dapat lebih sesuai dengan keadaan di lapangan serta memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Pendekatan ini dimulai dengan asesmen awal, di mana dilakukan survei sosial dan ekonomi untuk memahami kondisi masyarakat yang terdampak kemiskinan. Data yang dikumpulkan mencakup berbagai aspek, seperti tingkat pendapatan, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kondisi infrastruktur dasar. Dengan informasi ini, penyusun program dapat mengidentifikasi masalah utama yang perlu segera ditangani serta menyusun strategi yang paling efektif.

Setelah asesmen dilakukan, langkah selanjutnya adalah perencanaan partisipatif. Dalam tahap ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi juga turut berperan dalam proses perumusan program. Musyawarah desa, diskusi kelompok, dan forum warga sering kali digunakan sebagai media untuk menggali aspirasi masyarakat dan menentukan solusi yang



paling sesuai dengan kondisi lokal. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk mengungkapkan kebutuhan mereka secara langsung, sehingga program yang dijalankan lebih tepat sasaran. Saat program mulai dilaksanakan, masyarakat kembali dilibatkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Dalam proyek infrastruktur, misalnya, masyarakat miskin diberikan kesempatan untuk bekerja sebagai tenaga kerja lokal. Hal ini tidak hanya memberikan mereka penghasilan tambahan tetapi juga meningkatkan keterampilan dan pengalaman kerja. Dengan demikian, selain mendapatkan manfaat langsung dari program, masyarakat juga memiliki modal sosial dan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara mandiri di masa depan.

Evaluasi program menjadi bagian penting dalam pendekatan berbasis proses ini. Masyarakat diajak untuk menilai efektivitas program yang telah dijalankan serta memberikan masukan mengenai kendala yang dihadapi. Jika ditemukan kekurangan atau hambatan, maka program akan diperbaiki dan disesuaikan agar lebih efektif. Siklus ini terus berjalan sehingga program yang ada selalu mengalami penyempurnaan dan tetap relevan dengan kondisi yang berkembang. Salah satu keunggulan utama dari pendekatan ini adalah meningkatnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap program yang dijalankan. Ketika masyarakat dilibatkan sejak awal, mereka merasa lebih bertanggung jawab atas keberlangsungan program tersebut. Selain itu, pendekatan ini juga memastikan bahwa program benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya berdasarkan asumsi dari pihak luar. Dampak lain yang dihasilkan adalah pemberdayaan masyarakat, di mana mereka tidak hanya menerima bantuan secara pasif tetapi juga memperoleh keterampilan dan pengalaman yang bermanfaat untuk jangka panjang.

Mengatasi kemiskinan juga memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan berbagai strategi yang saling mendukung. Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah pendekatan proses, yang menekankan pentingnya memahami dan mengatasi akar penyebab kemiskinan melalui tahapan-tahapan yang sistematis. Selain itu, strategi pengentasan kemiskinan juga mencakup mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat kelembagaan sosial untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam upaya ini, dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan pendekatan-pendekatan tersebut, diharapkan upaya mengatasi kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan mencapai hasil yang berkelanjutan.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, pendekatan berbasis proses ini tetap menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya. Salah satunya adalah kurangnya kapasitas masyarakat dalam manajemen proyek dan keuangan, yang dapat menghambat kelancaran program. Selain itu, beberapa pihak, seperti pemerintah daerah atau institusi terkait, mungkin memiliki resistensi terhadap metode ini karena mereka lebih terbiasa dengan pendekatan top-down yang bersifat instruktif. Masalah lainnya adalah keterbatasan dana, terutama untuk melakukan survei dan pendampingan yang mendalam dalam proses asesmen dan evaluasi. Secara keseluruhan, pendekatan berbasis proses dalam penanggulangan kemiskinan merupakan strategi yang lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional yang hanya memberikan bantuan tanpa memberdayakan masyarakat. Dengan menjadikan masyarakat sebagai aktor utama, pendekatan ini tidak hanya menghasilkan program yang lebih berkelanjutan tetapi juga memberikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi (Ubur, 2012).

Cara mengatasi permasalahan diskriminasi itu memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak. Contohnya seperti "Pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai toleransi" adalah langkah awal untuk mengatasi diskriminasi. Dengan melalui pendidikan formal, kurikulum yang inklusif dapat mengajarkan siswa mengenai keberagaman,



hak asasi manusia, serta pentingnya menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Selain itu, pelatihan juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif diskriminasi. Pendidikan tidak hanya diberikan kepada anak-anak, tetapi juga kepada orang dewasa, termasuk tenaga kerja, pejabat publik, dan komunitas sosial, untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua orang (Asiva Noor Rachmayani, 2015)

Kesimpulan

Studi ini membahas strategi pembelajaran ilmu sosial (ilmu sosial) untuk mendukung dan mengatasi masalah sosial modern seperti ketidakadilan, perubahan iklim, dan konflik sosial. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan penelitian literatur, penelitian ini menekankan pentingnya metode pembelajaran yang secara aktif dan kritis mempromosikan partisipasi siswa dalam masalah sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah kontemporer, yaitu pembelajaran, dapat meningkatkan kesadaran sosial siswa dan keterampilan analitis berdasarkan masalah, dan lebih siap untuk tantangan masyarakat. Masalah sosial yang paling penting termasuk korupsi, kemiskinan dan diskriminasi, yang memiliki dampak besar pada kehidupan masyarakat. Pelatihan Ilmu Sosial diharapkan tidak hanya menyediakan materi akademik tetapi juga membentuk sikap dan moralitas yang baik bagi siswa. Strategi pembelajaran yang efektif memungkinkan siswa untuk menjadi lebih kritis, mempertimbangkan dan menyelesaikan masalah sosial di daerah mereka.

Daftar Rujukan

- Ama, J. T., & Kadir, S. A. (2024). Tinjauan Yuridis Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Yang Bersih Korupsi , Kolusi , dan Nepotisme Menuju Good Governance. 2(3), 205–216.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). Etika Diskursus Bagi Masyarakat Multikultural: Sebuah Analisis dalam Perspektif Pemikiran Jürgen Habermas. 6.
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Pendekatan penelitian pendidikan:
Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi.
Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2), 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>
- Dengan, K., & Multidisipliner, P. (2024). Perspektif Baru dalam Menejemen Pendidikan: Menangani Isu Kontemporer dengan Pendekatan Multidisipliner Puput. 09.
- Destrianjasari, S., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Pengertian, Teori Dan Konsep, Ruang Lingkup Isu-Isu Kontemporer Pendidikan Islam. Jurnal Ilmiah Mandala Education, 8(2), 1748–1757. <https://doi.org/10.58258/jime.v8i2.3304>
- Governance, G., Pencegahan, D., & Nepotisme, K. D. A. N. (2022). Upwya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik.1(3), 138–149.
- HENNI ENDAYANI, M. P. (2023). Isu sosial kontemporer. 1–13.
- Hidayat, B. (2020). Tinjauan historis pendidikan IPS di Indonesia. Jurnal Pendidikan IPS Indonesia, 4(2), 149. <https://doi.org/10.23887/pips.v4i2.3493>
- Kkn, N., Baru, B. M., Rusbiyanti, S., & Iswati, R. (2021). Bunishing Bureaucracy System dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi, DAN. September, 607–620.



- Masyarakat, Fakultas Perlindungan, ronaldo putra pratama sinurat. (2023). Analisis Faktor. Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. 5(2), 87–103.
- Penduduk, P., Salsabil, I., & Riani, W. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , Tingkat Pendidikan , Kesehatan dan. 15–24.
- Pengemis, K., Desa, D. I., Buluh, S. E. I., & Perbaungan, K. (2024). Stigma dan kapitalisasi kemiskinan: studi kehidupan sosial komunitas pengemis di desa sei buluh kecamatan perbaungan. 161–177.
- Rismayani, L. D., Kertih, I. W., & Sendratari, L. P. (2020). Penanaman sikap sosial melalui pembel. Jurnal Pendidikan IPS Indonesia, 4(1), 8–15. <https://doi.org/10.23887/pips.v4i1.3164>
- Saludung, Z. R., Juanda, & Hajrah. (2019). Diskriminasi Mayoritas Terhadap Minoritas dalam Novel Kedai 1001 Mimpi Karya Valiant Budi Tinjauan Sosiologi Sastra (Teori Diskriminasi Pettigrew). Jurnal Universitas Negeri Makassar, 1–21. <http://eprints.unm.ac.id/15201/>
- Saputra, I. (2017). Implementasi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2(1), 9–17.
- Sari, M. (2020). Penelitian kepustakaan (Library Research) dalam penelitian Pendidikan IPA. NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan P, 6(1), 41–53.
- Tangdilintin, P., & Prasetyo, B. (2014). Mengenal Masalah Sosial. Jurnal Pendidikan Universitas Terbuka, 2 (302), 1–49.
- Tutesa, & Wisman, Y. (2020). Permasalahan sosial pada masyarakat. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), 12(2), 94–99.
- Ubur, H. (2012). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Proses (Studi Kasus Masyarakat Wudi Nusa Tenggara Timur). Aspirasi, 2(2), 209–224.
- Wicaksono, A. L., & Soponyono, E. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanganan Diskriminasi Rasial Dengan Perspektif Pancasila. Jurnal Belo, 8(1), 48–66. <https://doi.org/10.30598/belovol8issue1page48-66>